



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NURUL HIKMAH
2. Jabatan : KETUA
3. NHK : 135296

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 200.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 4539 m2/98 m2 di BANJAR, WARISAN Rp. 150.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 3 m2/3 m2 di BANJAR, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 176.000.000

1. MOBIL, TOYOTA YARIS MINIBUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
4. MOTOR, HONDA SCOOPY SCOOTER Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
5. MOTOR, HONDA SCOOPY SCOOTER Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 2.500.000

D. SURAT BERTAGIH Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 40.155.883

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 418.655.883

III. HUTANG Rp. 455.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. -36.344.117



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **10 Februari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.